



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Marjan

Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email:meyditapratamasyahfitrii@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the Simpang Tiga Village Post Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to determine whether the government's rice reserve assistance program has been implemented properly or not at the Simpang Tiga Village Post Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The analysis used in this study is a quantitative method, namely the collected data is analyzed by describing and linking theories according to the existing problems, then interpreted against relevant results and conclusions are drawn and suggestions are given. While the population in this study were all employees at the Simpang Tiga Village Post Office. While the data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. Based on the results of research on the Implementation of the Government's Rice Reserve Assistance Program in Simpang Tiga Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, it has been implemented well.

Keywords: Implementation, Government Program, Rice Reserves

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum program bantuan cadangan beras pemerintah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuantitatif, yaitu yaitu penelitian yang menekankan analisis pada data data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika sehingga dapat diperoleh dengan hasil penilaian terhadap setiap variabel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara daftar pertanyaan atau kuesioner. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima manfaat dan pegawai yang ada di Kelurahan Simpang Tiga. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Program pemerintah, Cadangan Beras



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembagian beras cadangan oleh pemerintah merupakan langkah strategis dalam menangani masalah ketidakmampuan ekonomi di kalangan masyarakat. Program ini didesain untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke bahan pangan pokok, khususnya beras, tanpa menghiraukan latar belakang ekonomi mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti beras. Salah satu langkah yang diambil adalah pembagian beras cadangan. Tujuan utama dari pembagian beras cadangan ini adalah untuk mengurangi beban ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan menyediakan akses mudah dan terjangkau terhadap beras, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Pemerintah biasanya menjalankan program pembagian beras cadangan melalui mekanisme distribusi yang teratur. Kabupaten Kuantan Singingi khusus nya di Simpang Tiga teluk kuantan menjadi salah satu daerah yang menerima bantuan ini. Adapun bantuan pangan yang diberikan yakni beras 10 Kg/keluarga penerima manfaat(KPM) selama 3 kali pembagian yaitu bulan September, Oktober, dan November 2024. Bantuan pangan ini berasal dari Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Bulog sebagai penyedia bantuan dan kantor pos sebagai penyalur bantuan. Di Kecamatan Kuantan Tengah, salah satunya Kelurahan Simpang Tiga yang merupakan salah satu tempat dimana Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini dibagikan kepada masyarakat setempat. Penerima bantuan di Kelurahan Simpang Tiga pada bulan September, Oktober, November sebanyak 92 penerima. Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh penyaluran bantuan CBP, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) dan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) memilih pihaknya sebagai mitra karena dinilai mampu menyalurkan bantuan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel. Setiap desa di monitoring atau diawasi oleh satu orang staff dari PT. POS Indonesia guna memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut lancar tanpa ada kendala apapun. Dalam penelitian ini lokus penelitian ditetapkan pada Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu desa penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam beberapa tahun terakhir, sering di temukan beras dengan kualitas yang kurang baik seperti tekstur beras kurang bagus dan warna beras yang diterima pun tidak sesuai dengan kualitas beras pada umumnya dan saya melihat masih banyak KPM yang menerima bantuan tersebut apakah penyaluran beras ini telah tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah proses pelaksanaan Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan input bagi staff Kantor Pos Kelurahan Simpang Tiga Taluk Kuantan sehingga dapat berdayaguna dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 1.4.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dengan kajian lebih mendalam di bidang pelayanan.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Agus Hiplunudin (2021:22) administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist... all those operations having for the fulfilment and enforcement of public policy*) lebih lanjut, Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya lebih luas lagi, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan). Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Atmosudirdjo memerincikannya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut: Pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Kedua, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan pemerintah operasional. Ketiga, administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigent recht* (hukum yang memaksa). (Agus Hiplunudin, 2021:22).

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Engkus, 2022:18 kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari



publik atau orang banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menurut Nugroho dalam buku Kebijakan Publik (Uddin, 2017:10) Kebijakan publik dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: Pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga; bagaimana kebijakan publik tersebut di evaluasi. akan tetapi, dari semua isu diatas tersebut menurut Said Zainal Abidin dalam buku Kebijakan Publik (Uddin, 2017:10), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Mulyadi (2020:12) impleemtasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50) studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

2.1.4 Teori/Konsep Organisasi

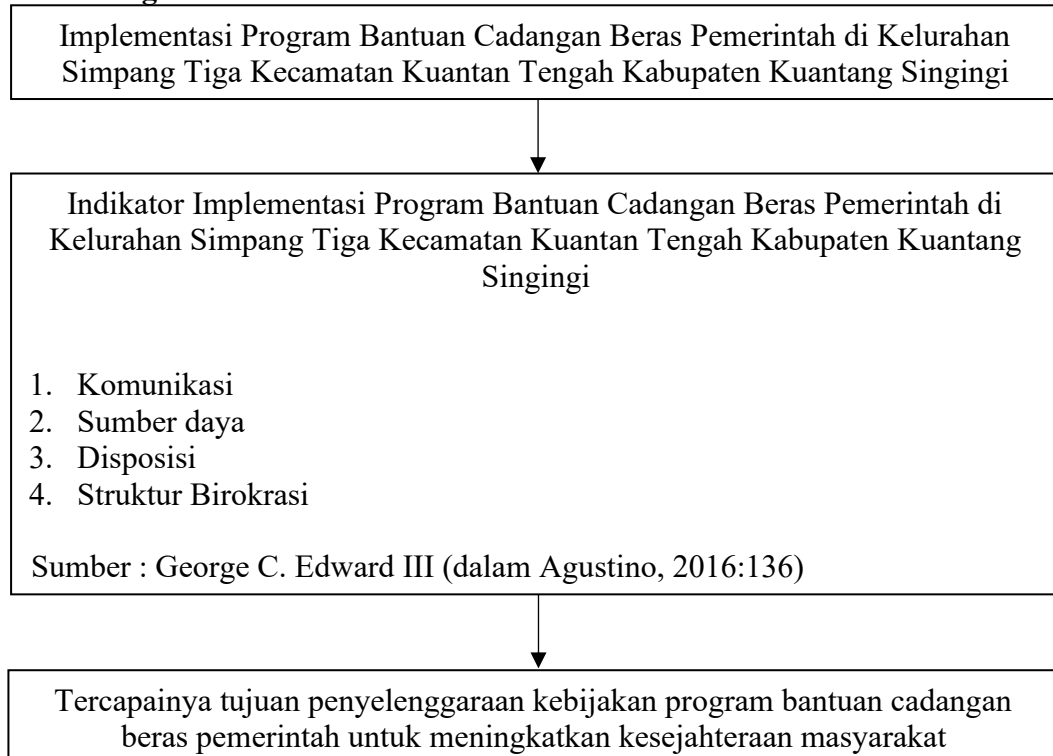
Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. (Malayu S.P Hasibuan, 2015:120). Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pradjudi Admosudiro (Hasibuan, 2015:121)

2.1.5 Teori/Konsep Program Pemerintah

Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat Dwidjowijojo (2015:57) "kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi".



2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan dalam teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136):

1. Komunikasi Diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
3. Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP.



2.4 Konsep Operasional

Judul	No	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	1	Komunikasi	a. Tujuan E-Kinerja b. Terukur/jelas c. Dampak E-Kinerja
	2	Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya anggaran c. Sumber daya teknologi
	3	Disposisi	a. Keberhasilan b. Koordinator antar pihak c. Keterbukaan informasi
	4	Struktur Birokrasi	a. Dukungan b. Sikap c. Kompetensi

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiono, 2014:88).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdai atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas da karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. (Sugiono, 2014:119). Populasi yang menerima bantuan cadangan beras pemerintah di Kelurahan Simpang Tiga berjumlah 85 KPM. Dikarenakan populasi yang banyak, untuk mempermudah dalam memperoleh presentase jawaban tersebut maka penulis menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah Sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (15,% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$



$$n = \frac{92}{1 + 92(0,15)^2}$$

$$n = \frac{92}{2,0925}$$

$$n = 43,96$$

n = 44 Responden (digenapkan)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 44 kelompok penerima manfaat. Jumlah responden tersebut dianggap sudah representatif untuk memperoleh data penulisan yang mencerminkan keadaan populasi.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (sugiyono, 2014:91). Dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lurah, pegawai kantor lurah, dan masyarakat Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya jenis populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sub Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah	1	1	20%
2	Pegawai Kantor Lurah	3	3	30%
3	Masyarakat	92	44	50%
Jumlah		96	48	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah, jurnal, artiker, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan



Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (sugiyono, 2017:162).

3.6.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. (sugiyono, 2020:166).

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:240) dokumentasi merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlaku. Peneliti mengumpulkan dokumentasi yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

3.7. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang di data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data diolah berdasarkan variabel berdasarkan indikatornya, disajikan dalam bentuk tabel, angka persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah dengan menggunakan pendekatan teori implementasi dari George C. Edwards III, yang terdiri atas empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Rata-rata skor tanggapan responden terhadap indikator komunikasi adalah 3,74. Sebagian besar responden (52%) menyatakan setuju dan 33% cukup setuju bahwa informasi mengenai program telah disampaikan dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi antara pelaksana dan masyarakat sudah cukup berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi agar lebih merata dan mendalam, terutama terkait prosedur penerimaan dan kriteria penerima manfaat.

Indikator sumber daya memperoleh rata-rata skor 3,81, menunjukkan bahwa pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Hal



ini terlihat dari penyaluran beras yang tepat sasaran dan lancar. Mayoritas responden (51%) setuju bahwa tenaga pelaksana dan sarana prasarana memadai. Tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, yang berarti bahwa faktor sumber daya bukan menjadi kendala utama dalam implementasi program ini.

Indikator Disposisi Indikator ini mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 3,85, dengan 51% responden menyatakan setuju dan 26% cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana program menunjukkan sikap yang positif, komitmen tinggi, dan bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan. Responden merasa pelaksanaan program sudah sesuai dengan etika dan prinsip keadilan. Masyarakat juga menunjukkan dukungan terhadap program, yang memperkuat sinyal bahwa pelaksana berhasil membangun kepercayaan publik.

Rata-rata skor indikator struktur birokrasi adalah 3,73, yang tergolong cukup baik. Program dianggap telah dilaksanakan sesuai prosedur (rata-rata skor sub indikator prosedur = 3,63), kualitas beras sesuai standar konsumsi masyarakat (rata-rata = 3,67), dan mekanisme implementasi dijalankan dengan baik (rata-rata = 3,88). Ini menunjukkan bahwa secara umum birokrasi dalam pelaksanaan program sudah cukup efektif dan tidak menjadi penghambat signifikan dalam realisasi kebijakan. Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah telah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Skor rata-rata keseluruhan adalah 3,78 dari skala 5, dengan sebagian besar responden berada pada kategori setuju (52%) dan cukup setuju (30%). Tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, dan hanya 3% yang tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat puas dan mendukung keberlangsungan program.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis dan persepsi masyarakat, program ini dinyatakan telah terimplementasi dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi publik dan penyempurnaan prosedur birokrasi agar semakin efisien dan transparan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat disimpulkan bahwa penerapan program bantuan cadangan beras pemerintah sudah terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi maka adapun saran saran yang diberikan sebagai berikut :

1. kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan penambahan sumber daya pelaksana kepada pihak pemerintah kelurahan atau pendamping khusus Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah sehingga dapat membuat waktu distribusi dan waktu bagi menjadi lebih cepat dan terfokus.
2. Kepada pemerintah kelurahan dan pendukung Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan untuk melakukan sosialisasi secara lebih menyeluruh dan dapat mengajak dusun, lingkungan dan RT serta RW yang belum mengikuti untuk ikut serta.
3. Kepada pelaksana program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga untuk lebih tegas dan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan melakukan pembaruan data KPM sehingga masyarakat yang menerima bantuan lebih tepat sasaran.
4. Kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan bantuan beras yang berkualitas bagus sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afifudin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta: Bandung
- Dwidjowijoyo. 2015. *Program Pemerintah*. Alfabeta: Bandung
- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*. PT Kimshafi Alung Cipta: Bekasi
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hiplunudin Agus. 2021. *Etika Administrasi Negara*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Uddin, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. CV SAH MEDIA: Makassar
- Wisnu, Dicky U.R. 2019. *Teori Organisasi Struktur dan Desain*. UMM Press: Malang

Jurnal:

- Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). Pengantar ilmu administrasi negara.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1(3): 17
- Maranda, H. (2020). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. April, 12-40
- Muspawi, M., & Claudia, P. R. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar di SMA Swasta Pelita Raya Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), 180-192.
- Rais, W, and M Nasor. 2023. "Teori Organisasi Sumber Daya Manusia." *Unisan*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Jurnal 02(09): 1–10. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/download/1998/1485>.

- Sahya, A. 2016. Ilmu Administrasi Negara. *In CV. Pustaka Setia* (Vol. 53, Issue 9)
- Syahida. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang dalam Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Sosial*, 3 (2)
- Tanjung Amran Sahputra, Purba Anggi Martuah, and Muhammad Mahadir. 2022. “Pemahaman Terhadap Teori-Teori Organisasi.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(4): 5816–23.

Undang-Undang:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 5
- Undang-Undang No. 6 tahun 2016 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Arah Kebijakan Bidang Desa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.\

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah